

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KETERJADIAN *RESTATEMENT***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

RIDHO WIDI KUSUMO

NIM : 12030110110084

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ridho Widi Kusumo

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110110084

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
KARAKTERISTIK *CORPORATE*
GOERNANCE TERHADAP KETERJADIAN
*RESTATEMENT***

Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 15 April 2014

Dosen Pembimbing,

(Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.)
NIP : 19760522 200312 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ridho Widi Kusumo

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110110084

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH
KARAKTERISTIK *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
KETERJADIAN *RESTATEMENT***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 14 Mei 2014

Tim Penguji

1. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt. (.....)
2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ridho Widi Kusumo menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KETERJADIAN *RESTATEMENT*** “ adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat atau sebagian tulisan yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat maupun pemikiran yang berasal dari penulis lain, yang seolah-olah menjadi sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau tulisan yang saya ambil dari penulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 April 2014

Yang membuat pernyataan,

(Ridho Widi Kusumo)

NIM: 12030110110084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO,

" Tak masalah seberapa sering kau jatuh yang terpenting seberapa cepat kau bangkit"- Arsene Wenger

“Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat memulai, tetapi siapa yang paling siap memulai” – Mr. Affandi

“Gagal karena mencoba lebih baik daripada gagal karena tidak melakukan apapun”

““If you want the respect of others, you must respect yourself first.”

"A person who never made a mistake never tried anything new."- Albert Einstein

“Ujian Bagi anak muda bukanlah masalah, tapi kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kepada proses pendewasaan” - Mario teguh

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku dan adikku, Anita Ayu yang selalu mendorongku untuk lebih maju.

Teman teman seperjuangan SD,SMP,SMA, hingga kuliah

Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of corporate governance characteristics on the financial restatement. Indicators used to measure corporate governance mechanisms in this study is the size of board, proportion of independent board, size of audit committee, managerial ownership, and institutional. While financial restatement as the dependent variable was measured using dummy variabel which used number 1 for restatement companies and number 0 for non-restatement companies. In addition, this study also added two control variables are firm size and leverage.

This study uses secondary data with entire population companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2008-2012. The method used to determine the sample using purposive sampling. Sample contains from 24 restate companies and 24 non-restate companies. The criteria of restatement companies allowed from GAO's definition of restatement and exclude restatement that was happened due to application of new PSAK, accounting method changes, merge and acquisition that accordance with PSAK, and stock splits or reverse stock. The analytical method used is logistic regression.

The results of hypothesis testing showed that the proportion of independent board and institutional ownership negatively affects the financial restatement. While size of board, size of audit committee and managerial ownership did not significantly affect restatement. Overall it can be concluded from these results that the corporate governance characteristics affect with occurrence of restatement.

Keywords: *corporate governance, Financial restatement, GAO*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *restatement*. Indikator yang digunakan untuk mengukur karakteristik *corporate governance* adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham institusional. Sedangkan keterjadian *restatement* sebagai variabel dependen diukur dengan variabel dummy, dimana angka 1 untuk perusahaan yang melakukan *restatement*, dan angka 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan *restatement*. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel terdiri dari 24 perusahaan yang melakukan *restatement* dan 24 perusahaan kontrol yang tidak melakukan *restatement*. Kriteria perusahaan *restatement* dipilih berdasarkan *GAO's definition of restatement* dimana sampel tidak termasuk perusahaan yang melakukan *restatement* karena penerapan PSAK, perubahan metode akuntansi, merger dan akuisisi yang sesuai PSAK, dan pemecahan atau penggabungan saham. Di samping itu, penelitian ini juga menambahkan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*. Sedangkan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa beberapa karakteristik *corporate governance* mempengaruhi keterjadian *restatement*.

Kata kunci: *corporate governance, restatement, GAO*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Keterjadian *Restatement*”.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, dorongan semangat, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. M. Nasir, M. Si, Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
2. Wahyu Meiranto, S.E, M.Si, Akt selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan banyak arahan dan masukan yang sangat bermanfaat terkait pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnsi Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dengan memberikan masukan dan kritikan yang membangun. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak dan ibu dosen
4. Seluruh staf Akuntansi Reguler 1 atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan dalam bidang akademik dan pelayanan mahasiswa.
5. Kedua orangtuaku, Bapak Kus Supriadi dan Ibu Endang Sri Widayanti

serta adik saya Kemal Cahya Ramadhan yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta mendoakan saya dalam pembuatan skripsi ini.

6. My Beloved Partner, Anita Ayu Pangestu yang selalu memberi semangat kepada saya dan mengisi hari dan hatiku dengan penuh warna.
7. Seluruh mahasiswa akuntansi angkatan 2010 yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga kita semua sukses selalu dan mendapat perlindungan Allah SWT.
8. Seluruh teman bimbingan saya yaitu Haniatun, Acil, Rani, Lina, Nabella, Arya yang telah banyak membagi ilmunya dalam pembuatan skripsi ini.
9. Geng “Rak Tau Dolan”. Tatang, Yudha, Erlang, Vina, Silvi, Andi, Tya, Lina, Hisyam, Bowo, Alto, Fian. Kalian konco konco bosokku tersayang. Semoga kita bisa reunion dalam keadaan sukses dan kalian selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT
10. Teman-teman Soulsaver Anta, Cica, Kremi, Rio, Made, Ridwan, Bagas, dan lain-lain yang menjadi teman dalam suka dan duka di kala SMA.
11. Seluruh teman teman Keluarga Mahasiswa Akuntansi yang telah memberikan ilmu tentang akademik maupun *softskill* kepada saya
12. Adik-adik akuntansi 2012, Abik, Seto, Baredi yang selalu menanyakan “sidang kapan mas?” sehingga saya dapat termotivasi untuk terus maju.
13. Teman-teman KKN Desa Kalibeluk Ceria Febi, Edi, Evi, Deve, Anisa, Ririn, Liza, Ika, Safrita yang telah menjadi teman seperjuangan selama KKN

14. Tutor Easy Speak, Mr. Afandi, Ms. Ridha, dan MS. Eky yang banyak memberikan motivasi dan arahan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa inggris.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat berharap atas kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Wassalammualaikum Wr Wb

Semarang, 15 April 2014

Penulis

Ridho Widi Kusumo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENEKSAHAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori Penelitian dan Penelitian Terdahulu.....	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2 Penyajian Kembali (<i>Restatement</i>)	15
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	18

2.1.4 Dewan Komisaris	20
2.1.4.1 Ukuran Dewan Komisaris	21
2.1.4.2 Independensi Dewan komisaris.....	21
2.1.5 Komite Audit.....	23
2.1.5.1 Ukuran Komite Audit.....	23
2.1.6 Kepemilikan Saham Manajerial	25
2.1.7 Kepemilikan Saham Institusional.....	26
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	31
2.4 Perumusan Hipotesis	33
2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris	33
2.4.2 Independensi Dewan Komisaris.....	34
2.4.3 Ukuran Komite Audit	35
2.4.4 Kepemilikan Saham Manajerial	36
2.4.5 Kepemilikan Saham Institusional	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	39
3.1.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)	39
3.1.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)	40
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	40
3.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris	40
3.1.2.3 Ukuran Komite Audit	41
3.1.2.4 Kepemilikan Saham Manajerial	41
3.1.2.5 Kepemilikan Saham Institusional	42

3.1.3 Variabel Kontrol	42
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	42
3.1.3.2 <i>Leverage</i>	43
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	44
3.5 Metode Analisis Data	45
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
3.5.2 Pengujian Hipotesis.....	45
3.5.2.1 Uji Hosmer and lameshow Goodness of Fit.....	47
3.5.2.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model	48
3.5.2.3 Uji Nagelkerke R Square	48
3.5.2.4 Uji Signifikansi Koefisien Determinasi.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	50
4.2 Analisis Regresi Logistik	51
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	51
4.2.2 Analisis Regresi Logistik	57
4.2.2.1 Uji <i>Hosmer and Lameshow's Goodness of Fit</i>	57
4.2.2.2 Uji <i>Overall Fit Model</i>	58
4.2.2.3 Uji Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>)	59

4.2.2.4 Pengujian Hipotesis	60
4.3 Intepretasi Hasil.....	63
4.3.1 Hipotesis 1	63
4.3.2 Hipotesis 2	64
4.3.3 Hipotesis 3	65
4.3.4 Hipotesis 4	66
4.3.5 Hipotesis 5	67
4.3.6 Variabel Kontrol	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	71
5.3 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	31
------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 <i>Hosmer and Lameshow's Goodness of Fit Test</i>	57
Tabel 4.4 <i>Overall of Model Fit</i>	59
Tabel 4.5 Perbandingan <i>-2Log Likelihood</i> awal dengan <i>-2Log Likelihood</i> Akhir ..	59
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Nagelkerke R Square</i>	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis	61
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel.....	78
Lampiran 2 Analisis Statistik Deskriptif.....	79
Lampiran 3 Analisis Regresi Logistik	80
Lampiran 4 Tabel <i>GAO's Definition of Restatement</i>	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang berisi kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat berfungsi sebagai acuan untuk para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (PSAK no 1). Agar dapat berfungsi dengan baik, laporan keuangan yang dibuat manajemen harus memiliki kualitas yang baik serta dapat diandalkan.

Namun, isu-isu terkait laporan keuangan telah banyak terjadi di berbagai negara. Pada tahun 1998, Waste Management Inc (WMI), sebuah perusahaan manajemen limbah terbesar di AS mengumumkan bahwa mereka melakukan penyajian laba kembali (*earning restatement*) untuk tahun 1992-1996. Mereka mengakui bahwa mereka memanipulasi laporan keuangan dengan cara menggelembungkan laba sebesar \$3,34 miliar dollar sebelum pajak dengan tujuan menjaga tampilan kesuksesan perusahaan. Pada kenyataannya, WMI mengalami profitabilitas dan pertumbuhan riil yang melambat. Akibat penyajian kembali tersebut, pertumbuhan dan harga saham perusahaan pun mulai rusak. Tidak hanya itu, Arthur Anderson sebagai auditor dari WMI pun diwajibkan membayar denda sebesar \$7juta (Grace 2013). *United States General Accounting Office (GAO)* mengestimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya *restatement* laporan

keuangan perusahaan pada tahun 1997-2002 di pasar AS. GAO menyatakan *earning restatement* menyebabkan kerugian kapitalisasi pasar di AS sebesar \$100 milyar dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pasar modal (GAO 2000, 26, 32-41).

Di Indonesia, isu tentang penyajian laba kembali terjadi pada tahun 2002. PT Kimia Farma diharuskan melakukan *earning restatement* pada laporan keuangannya setelah Kementrian BUMN dan Bapepam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan terungkap bahwa laba disajikan lebih tinggi dari laba sebenarnya dengan cara menggelembungkan nilai harga pada daftar persediaan sehingga menimbulkan *overstated* (Tempo,2002). KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa yang menangani kasus ini telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, tetapi gagal mendeteksi kecurangan ini. Akibat penyajian kembali ini, pemerintah melakukan divestasi saham ke PT Kimia Farma.

Berbagai kasus *earning restatement* yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi gambaran tentang kualitas dari suatu laporan keuangan. *Restatement* adalah penyajian kembali laporan keuangan ketika kesalahan material ditemukan dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Ketika kesalahan seperti itu ditemukan, perusahaan harus memperingatkan investor bahwa laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya tidak lagi dapat diandalkan dan ditinjau untuk penyajian ulang.

Agrawal dan Chada (2005) menyatakan adanya relevansi tentang ketidakandalan laba yang dilaporkan yang terus meningkat, dibuktikan dengan kekhawatiran yang disebabkan karena meningkatnya frekuensi *restatement*

oleh perusahaan beberapa tahun terakhir. Begitu pula dengan hasil penelitian Nuryani (2010) yang menyatakan bahwa terjadinya *restatement* dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Seperti pada kasus PT Kimia Farma, praktek penggelembungan laba yang dilakukan perusahaan menyebabkan laporan keuangan harus disajikan ulang karena terdapat kesalahan pencatatan, yang menurut Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dapat menyesatkan para investor dalam mengambil keputusan ekonomi. Praktek *restatement* yang banyak dilakukan perusahaan membuat beberapa kalangan memandang kasus ini sebagai akibat dari lemahnya sistem *good corporate governance* (GCG) perusahaan dalam membuat dan mengawasi proses pembuatan laporan keuangan.

Menurut *Cadbury Report*, *corporate governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan tanggungjawabnya kepada para *shareholder dan stakeholder*. *Corporate governance* mengatur tentang kewenangan pihak pihak yang berkaitan dengan perusahaan, seperti komisaris, direksi, manajer, pemegang saham agar dapat memahami fungsi, peran, dan tanggung jawab masing masing dalam menjalankan perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong pertumbuhan perusahaan.

Untuk dapat meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, berbagai upaya pun mulai dilakukan. Pada tahun 1992, Inggris membentuk Komite Cadbury (*Cadbury Commitee*) yang membuat dan

memberikan beberapa rekomendasi penerapan GCG kepada perusahaan-perusahaan di Inggris. Sedangkan di Indonesia, konsep GCG mulai diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka mengembalikan ekonomi pasca krisis. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia pun membentuk suatu komite bernama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang kemudian direvitalisasi menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pada tahun 2006, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) membuat panduan tentang struktur *good corporate governance* yang berisi pedoman pembentukan unsur-unsur *good corporate governance* seperti dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan saham.

Salah satu unsur dalam pembentukan *corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan pengawasan dan nasihat kepada direksi agar tetap sesuai dengan prinsip GCG (KNKG, 2006). Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pembentukan dewan komisaris harus memperhatikan beberapa hal, seperti ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris.

Ukuran dewan komisaris dapat menentukan seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh komisaris. Selain itu, ukuran dewan komisaris harus dapat memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, cepat, dan tepat. Disamping ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris menjadi karakteristik yang sangat penting. Kemampuan dewan komisaris dalam

mekanisme pengawasan yang efektif tergantung pada independensinya terhadap manajemen (Beasley,1996). Independensi dibutuhkan agar dewan komisaris dapat bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi profesionalisme. Dengan pengawasan yang efektif dari komisaris, diharapkan kecurangan dalam laporan keuangan dapat diminimalisir dan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan.

Unsur *corporate governance* lainnya yang tidak kalah penting adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Pada perusahaan publik ketentuan komite audit telah diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE03/PM/2000 tertanggal 05 Mei 2000. Komite audit diangkat oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, ukuran komite audit menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Menurut KNKG, komite audit dipimpin oleh seorang komisaris independen dan setidaknya 2 orang anggota. Selain memperhatikan ukuran, independensi menjadi karakteristik yang sangat penting bagi komite audit. Independensi diperlukan untuk menila kinerja auditor internal, mengatasi konflik auditor eksternal (Agrawal et al., 2005) dan untuk menilai objektivitas dan independensi auditor eksternal (IKAI, 2004)

Selain dewan komisaris dan komite audit, struktur kepemilikan merupakan bagian penting dalam proses implemementasi *good corporate governance*. Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan (Wardhani, 2005) dalam (Nuraeni, 2010). Kepemilikan saham

institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. al 2006) dalam Winanda (2009). Pemilik saham institusional cenderung berperilaku aktif untuk dapat meningkatkan terjadinya pengawasan terhadap manajemen karena setiap keputusan manajemen akan berdampak langsung bagi mereka. Investor institusi memiliki sumber daya untuk memonitoring kinerja manajemen Begitu pula dengan kepemilikan saham manajerial. Kepemilikan saham manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris perusahaan (Boediono, 2005). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik di keagenan adalah dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya. Hal ini mengindikasikan pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan (Suprayuga, 2006).

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap terjadinya *restatement* telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Veronica (2005) yang menemukan bahwa independensi komisaris, proporsi kepemilikan saham, dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya *restatement*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Larry (2011), menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya *earning restatement*. Hal ini diperkuat dengan penelitian

Rani (2011) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap keterjadian penyajian laba kembali. Namun, hasil penelitian berbeda juga diperoleh oleh beberapa peneliti. Agrawal dan Chada (2005) meneliti pengaruh mekanisme corporate governance terhadap penyajian kembali laba perusahaan dan tidak ditemukan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut.

Dari hasil berbagai penelitian di atas, terdapat hasil yang tidak konsisten antara penelitian satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena perbedaan sampel dan metode pengukuran setiap variabel. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Rani (2011) dan Pertiwi (2012) menggunakan sampel perusahaan yang melakukan *restatement*, namun tidak diidentifikasi dan diklasifikasikan lebih lanjut mengenai faktor penyebab *restatement*. *Restatement* yang disebabkan oleh penerapan PSAK baru, proses akuisisi yang sesuai PSAK, perubahan metode akuntansi yang baru, dan *stocksplits* tidak dimasukkan sebagai sampel karena faktor-faktor tersebut tidak mengindikasikan adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik *corporate governance* seperti dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan saham terhadap keterjadian *restatement* di Indonesia. Sampel perusahaan dalam penelitian ini diidentifikasi menurut *GAO's definition of restatement*. Perusahaan yang melakukan penyajian kembali karena merger dan akuisisi yang sesuai PSAK, *stocksplits*, penerapan PSAK baru, dan perubahan metode akuntansi tidak dimasukkan sebagai sampel penelitian. Sampel

perusahaan di ambil dari perusahaan yang melakukan *restatement* selama tahun 2008-2012 dan menggunakan proksi proksi dari *corporate governance* seperti ukuran komisaris, independensi komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham institusional.

Bedasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk menguji lebih lanjut pegraruh antara *corporate governance* terhadap keterjadian *restatement*. Penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul “Pengaruh karakteristik *Corporate Governance* terhadap keterjadian *Restatement*.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari penelitian penelitian di atas, masih terdapat hasil yang tidak konsisten tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Selain itu, pemilihan sampel di beberapa penelitian dianggap belum tepat karena sampel yang dimasukkan tidak diidentifikasi lebih lanjut mengenai faktor penyebab terjadinya *restatement*. Faktor penyebab seperti perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lain yang dibuat bukan untuk mengkoreksi kesalahan seharusnya tidak ikut dimasukkan karena tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu,perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini dengan memilih sampel yang lebih konkrit serta menggunakan variabel karakteristik *corporate governance* yang lebih lengkap. Melihat hal ini, terdapat beberapa pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Apakah terdapat pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?

2. Apakah terdapat pengaruh negatif antara independensi dewan komisaris terhadap penyajian kembali laporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh negatif antara ukuran komite audit terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan saham manajerial terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?
5. Apakah terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan saham institusional terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara independensi dewan komisaris terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara ukuran komite audit terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara kepemilikan saham manajerial terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara kepemilikan saham institusional dengan keterjadian penyajian kembali laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang akuntansi khususnya mengenai *good corporate governance*, dan keterjadian penyajian kembali atau *restatement*.

1.4.2 Manfaat praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini dapat :

- Memberikan pengetahuan bagi setiap perusahaan di Indonesia tentang pentingnya penerapan struktur *good corporate governance*
- I. - Memberikan informasi dan referensi bagi pihak pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Usulan penelitian ini dibagi dalam 3 bab dan didalamnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Secara garis besar, beberapa bab dan sub bab tersebut dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam usulan penelitian ini. Didalamnya terdapat sub bab yaitu Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 2 : TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan, teori yang digunakan, kerangka penelitian, serta hipotesis yang digunakan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang variabel yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran dari hasil penelitian

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Penelitian dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (*agency theory*) sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan principal (pemegang saham). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kesepakatan kerja (kontrak) dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam teori agensi, digambarkan hubungan di dalam perusahaan antara pemegang saham perusahaan (sebagai prinsipal) dengan manajemen perusahaan (sebagai agen).

Teori keagenan yang mulai berkembang mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut masalah keagenan.

Teori keagenan berkaitan erat dengan *corporate governance*. Konflik keagenan muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari

kepemilikannya. Pemilik perusahaan memberikan kewenangan kepada dewan komisaris dan direksi untuk mengurus jalannya perusahaan serta membuat keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka manajer berkemungkinan untuk bertindak tidak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan. Pihak manajer menginginkan *fee* kontraktual sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya, sebaliknya pihak pemilik termotivasi mengadakan kontrak dengan agen untuk memaksimalkan *return* untuk menambah kesejahteraan dirinya. Dengan kata lain, manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemilik (Riyanto, 2003). Konflik kepentingan ini terus meningkat karena pemilik tidak dapat memonitor aktivitas manajer sehari hari untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemegang saham. Manajer yang terlibat langsung dengan proses kegiatan perusahaan, memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan para pemilik saham. Hal ini lah yang disebut dengan asimetri informasi.

Pada akhirnya, konflik kepentingan dan asimetris informasi tersebut dapat mendorong agen untuk tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada prinsipal dan dapat berpengaruh pada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dapat menjadi tidak relevan dan tidak netral karena laporan keuangan berpihak pada kepentingan sang agen. Laporan keuangan ditampilkan sebagus mungkin melalui manipulasi yang dilakukan oleh manajemen yang pada akhirnya dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan dan pada akhirnya membuat laporan keuangan tersebut harus disajikan

kembali.

Untuk mengatasi masalah keagenan, diperlukan mekanisme yang berfungsi untuk melindungi kepentingan prinsipal, yaitu dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG). GCG merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dimana GCG dibuat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* dana yang telah mereka investasikan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya biaya agensi yang digunakan oleh prinsipal untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen sebagai berikut :

1. *Monitoring Cost*

Monitoring cost atau biaya monitoring adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengamati, mengukur, dan mengontrol aktivitas aktivitas yang dilakukan pihak manajemen. Biaya ini termasuk biaya untuk audit, rencana kompensasi eksekutif, dan juga biaya untuk memberhentikan manajer.

2. *Bonding Cost*

Bonding cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjamin agen agar agen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan manajer. Para agen akan diberi kompensasi yang wajar apabila bertindak sesuai dengan keinginan pemilik dan tidak akan diberikan kompensasi apabila tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilik.

3. *Residual Loss*

Penyelarasan kepentingan antara prinsipal dan agen masih sulit dilakukan meskipun telah mengeluarkan *monitoring cost dan bonding*. Akibatnya, terjadinya *agency losses* dari perbedaan kepentingan dan ini disebut *residual loss*. *Residual loss* menunjukkan adanya *trade off* antara membatasi manajer dan memaksakan mekanisme kontrak yang didesain untuk mengurangi *agency problems*. Secara umum, tidak ada perusahaan yang tidak memiliki biaya keagenan kecuali bagi perusahaan yang dikelola sepenuhnya oleh seorang manajer (Jensen and Meckling, 1997).

2.1.2 Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Restatement*)

Definisi penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) umumnya dipandang sebagai koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (GAO, 2002). Penyajian kembali laporan keuangan dapat terjadi ketika perusahaan, baik secara sukarela atau diminta oleh auditor atau regulator, merevisi informasi keuangan publik yang sebelumnya dilaporkan. Penyajian kembali laporan keuangan dapat pula didefinisikan sebagai revisi dan publikasi satu atau lebih dari laporan keuangan sebelumnya perusahaan. Penyajian kembali ini diperlukan saat itu ditentukan bahwa pernyataan sebelumnya berisi ketidaktepatan material. Kebutuhan untuk menyajikan kembali angka-angka keuangan dapat hasil dari kesalahan akuntansi, ketidakpatuhan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecurangan, keliru atau kesalahan administrasi yang sederhana. Sebuah

penyajian kembali negatif sering membuat turunnya kepercayaan investor dan menyebabkan harga saham menurun.

Huron Consulting Group (2003) menjelaskan tiga penyebab utama kesalahan akuntansi : 1. masalah dalam menerapkan aturan akuntansi , 2. Kesalahan manusia dan 3. Kesalahan sistem.

Di Indonesia, PSAK No. 25 mengelompokkan faktor utama yang mempengaruhi revisi atau penyajian kembali laporan keuangan ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) Perubahan Estimasi Akuntansi (*changes in accounting estimates*), (2) Kesalahan Mendasar (*fundamental errors*), dan (3) Perubahan Kebijakan Akuntansi (*changes in accounting policies*).

A. Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*)

Paragraf 30 – 36 PSAK No. 25 mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas kesalahan mendasar. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan yang mendasar, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba awal periode. Informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis.

Dengan kata lain, suatu koreksi atas kesalahan mendasar dalam pelaporan keuangan harus diterapkan secara retrospektif, artinya bahwa laporan keuangan yang menyajikan informasi komparatif untuk periode sebelumnya, disajikan seolah-olah kesalahan mendasar telah dikoreksi dalam periode di mana kesalahan tersebut dibuat. Jumlah koreksi yang berhubungan dengan setiap periode dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Sedangkan jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif, disesuaikan pada saldo laba awal periode dalam periode yang paling awal.

B. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan suatu perusahaan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Zoe-Vonna Palmrosse dan Susan (2004) dalam Agrawal dan Chada (2005) menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan *earning restatement* dimana tidak seperti manajemen laba yang mungkin dilakukan rutin oleh banyak perusahaan yang terikat berbagai derajat, *earning restatement* merupakan

kejadian serius untuk perusahaan. Banyak perusahaan yang setelah melakukan earning restatement mengalami kebangkrutan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya *restatement*. Menurut *GAO's definition of Restatement*(2006), faktor-faktor penyebab restatement diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu restatement yang disebabkan karena: 1) Akuisisi dan merger yang tidak sesuai peraturan. 2) Kesalahan dalam mencatat biaya dan perlakuan pajak. 3) *Fraud*. 4) klasifikasi item yang tidak tepat. 5) Kesalahan akuntansi pada akun akun investasi, *goodwill*, aktivitas restrukturisasi, dan penilaian persediaan. 6) *Error* pada pencatatan pengakuan pendapatan. 7) Kesalahan akuntansi dalam perlakuan saham, *derivative*, dan hal-hal yang menyangkut surat berharga. Sedangkan, faktor-faktor penyebab *restatement* seperti penerapan PSAK baru, merger dan akuisisi, *stocksplits*, dan perubahan metode akuntansi tidak dimasukkan sebagai sampel dalam penelitian ini.

2.1.3 Corporate Governance

Corporate governance merupakan elemen penting dalam suatu perusahaan, dimana *Corporate governance* meliputi rangkaian proses, kebijakan, aturan dan institusi yang dapat mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan. Definisi *corporate governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) (2001) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Ada lima asas utama dalam penerapan *Good corporate governance* (KNKCG, 2006) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan. Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparent* (keterbukaan), yaitu menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (independen), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.4 Dewan Komisaris

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mendefinisikan dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi agar tetap sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Selain itu, dewan komisaris mempunyai tanggung jawab pengawasan atas kualitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini terkait pengawasan kepada manajemen agar tidak melakukan praktek manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Vafeas (2000) dalam Siallagan (2006) menyatakan bahwa peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.

KNKG (2006) menulis beberapa prinsip agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, diantaranya :

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.1.4.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peranan yang penting dalam praktek *good corporate governance*. Hal ini tidak terlepas dari tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh direksi. Menurut KNKG (2006), jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan tersebut. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka CEO akan semakin mudah dikendalikan dan pengawasan dapat menjadi semakin efektif. Ukuran dewan komisaris ditentukan oleh resiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan. Pola pikir “*Two heads is better than one*” yang berarti bahwa semakin banyak yang memikirkan dan memantau berbagai resiko yang dihadapi perusahaan, maka

semakin besar perusahaan dapat menghadapi ancaman yang berasal dari resiko tersebut (Kusuma).

2.1.4.2 Independensi Dewan Komisaris

Proporsi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. KNKG (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari 2 jenis, yaitu komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Komisaris yang terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta dengan perusahaan itu sendiri, sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perseroan.

Peraturan Bapepam nomor IX.1.5 memuat tentang kriteria kriteria komisaris independen , yaitu;

- a) Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- b) Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu (enam) bulan terakhir;

- c) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
- d) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- e) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- f) Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, komisaris independen dalam perusahaan harus berjumlah minimal 30% dari total anggota komisaris yang dapat dipilih melalui RUPS. Hal tersebut dikarenakan agar proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan serta pengambilan keputusan dapat berjalan efektif, cepat, tepat, serta independen (KNKG, 2006).

2.1.5 Komite Audit

BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mewajibkan setiap perusahaan publik wajib memiliki komite audit dan pedoman kerja komite audit. Komite Audit merupakan salah satu komite yang dibuat oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dewan komisaris mengawasi dan menjamin kualitas laporan keuangan perusahaan yang akan diterbitkan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip berlaku umum, mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal telah dilakukan sesuai standar yang berlaku, serta melakukan tindak

lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen. Dalam pedoman *corporate governance* KNKG (2006), komite audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengalaman yang memadai yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.

2.1.5.1 Ukuran Komite Audit

Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawab. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif (KNKG, 2006) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan. Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda. Anggota komite audit harus bersifat independen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Komite audit yang independen diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap auditor eksternal perusahaan.

Bapepam (2004) menetapkan kebijakan bagi pihak-pihak yang menjadi komite audit diantaranya:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan publik, Kantor Konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, dan jasa konsultasi kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada emiten.
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
4. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir.

2.1.6 Kepemilikan Saham Manajerial

Menurut Boediono (2005) kepemilikan saham manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen yang dimaksud adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan. Dengan memiliki saham perusahaan, manajemen akan ikut merasakan langsung dampak dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini membuat para manajer akan merasakan konsekuensi langsung dari setiap keputusan yang diambil.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga hal ini dapat berdampak baik bagi perusahaan dan para pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial disebut sebagai solusi untuk mengurangi konflik agensi, dimana para

manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bagi perusahaan karena efek dari keputusan yang dihasilkan akan memiliki manfaat langsung bila keputusan yang diambil tepat, serta kerugian bila mengambil keputusan yang salah. Jensen (1986) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga kinerja serta kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat.

2.1.7 Kepemilikan Saham Institusional

Pengertian dari kepemilikan saham institusional adalah saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Menurut Wening (2007) dalam Sabrina (2010), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena setiap keputusan yang dilakukan oleh manajemen akan mempunyai dampak langsung bagi investor.

Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

- 1 Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.

- 2 Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
- 3 Investor institusional, secara umum, memiliki realsi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
- 4 Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
- 5 Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

Investor institusi cenderung memiliki perilaku aktif dalam memonitoring kinerja manajemen. Hal tersebut akan membuat manajemen lebih berhati hati dalam mengambil keputusan. Pengawasan lain yang dilakukan oleh investor adalah dengan memberi masukan masukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh antara karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadaan penyajian kembali atau *restatement*.

1. Penelitian Lin, Jun F. Li, dan Joon S. Yang (2006) menguji pengaruh antara karakteristik komite audit yang diprosikan dengan independensi, ukuran, keahlian, frekuensi rapat, dan kepemilikan saham komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Dari hasil penelitian tersebut, ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.
2. Abdullah (2010) yang meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *earning restatement* menemukan bahwa *restatement* terjadi pada perusahaan yang independensi komite nominasinya rendah serta memiliki proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi, selain itu independensi komite audit berhubungan dengan keterjadian *earning restatement*
3. Selanjutnya, penelitian Lary dan Dennis W. Taylor (2011) menemukan bahwa semakin besar independensi komite audit dan kompetensi komite audit ,maka semakin kecil pula tingkat keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
4. Di indonesia, Veronica dan Yanivi S. Bachtiar (2005) meneliti tentang karakteristik *corporate governance* (komposisi dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan isntitusal, kepemilikan blockholder, kualitas audit) terhadap keterjadian penyajian kembali. Dari penelitian tersebut, Veronica dan Yanivi menemukan independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian penyajian kembali (*restatement*).
5. Yuristia dan Niki Lukviarman (2008) menguji pengaruh antara strong boards terhadap keterjadian *restatement* dan menemukan hubungan negatif signifikan

antara strong boards terhadap restatement pada perusahaan kecil dan hubungan positif antara strong boards dengan *restatement* pada perusahaan besar.

6. Rani (2011) telah meneliti hubungan antara independensi, keahlian, frekuensi pertemuan, dan ukuran komite audit terhadap *earning restatement*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *restatement*.

7. Nina Pertiwi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Hubungan antara performa komite audit dengan earnings quality*” menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Independen	Variabel dependen	Hasil
1.	Sylvia Veronica dan Yanivi S. Bachtiar (2005)	<i>The Role of Corporate Governance to Preventing Misstated Financial Statement</i>	Komposisi Dewan komisaris -Independensi dewan komisaris -Komite audit -Kepemilikan institusional -Kepemilikan blockholder -Kualitas Audit	<i>-Earning Restatement</i>	Independensi dewan komisaris, proporsi kepemilikan saham institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian <i>earning restatement</i>
2.	Jerry W. Lin, Jun F. Li, dan Joon S. Yang (2006)	<i>The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality</i>	-Independensi komite audit -Ukuran komite audit -Keahlian komite audit -Frekuensi rapat komite audit -Kepemilikan saham komite audit	<i>-Earning restatement</i>	-Terdapat hubungan negatif signifikan antara ukuran komite audit dengan keterjadian <i>restatement</i> -Karakteristik komite audit yang lainnya tidak berpengaruh terhadap <i>restatement</i>
3.	Citra Yuristia	Analisis hubungan	-Independensi dewan	<i>-Restatement</i>	-Terdapat hubungan positif signifikan

	dan Niki Lukviarmann (2008)	antara <i>Strong Boards</i> dan <i>External Governance</i> terhadap <i>Accounting Restatement</i>	komisaris -Independensi komite audit -Ukuran dewan komisaris -B index	<i>t</i>	antara <i>strong boards</i> dan <i>external governance</i> terhadap <i>accounting restatement</i> pada perusahaan besar -Terdapat hubungan negatif signifikan antara <i>strong boards</i> dan <i>external governance</i> terhadap <i>accounting restatement</i> pada perusahaan kecil
4.	Shamsul Nahar Abdullah (2010)	<i>Financial Restatement and Corporate Governance among Malaysia Listed Companies</i>	- <i>Board Independence</i> - <i>Nominating Committee</i> - <i>Audit Committee independence</i> - <i>Managerial ownership</i> - <i>Outside blockholder</i>	<i>Financial Restatement</i>	-Kepemilikan saham Blockholder berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>restatement</i> - <i>Independence board, nominating committee independence, CEO duality, dan Managerial Ownership</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>restatement</i>
5.	Akeel M. Lary and Dennis W. Taylor (2011)	<i>Governance Characteristics and role of Audit Committee</i>	- <i>Independence Audit Committee</i> - <i>Financial Expertise Audit committee</i> - <i>Diligence Audit Committee</i>	- <i>Financial restatement</i> -non service audit fee ratio	- <i>Independence</i> dan <i>Financial expertise</i> komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>restatement</i> - <i>Diligence Audit Committee</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap non service audit fee ratio
6.	Prawita Mandhega	Pengaruh Kinerja	-Independensi komite audit	- <i>Earning Restatement</i>	-Independensi komite audit secara

	Rani (2011)	Komite Audit terhadap manajemen Laba (Dengan menggunakan <i>earning restatement</i> sebagai proksi dari manajemen laba)	-Ukuran komite audit -Keahlian di bidang keuangan komite audit -Pertemuan (rapat) komite audit		signifikan berpengaruh negatif terhadap keterjadian <i>earning restatement</i> -Karakteristik komite audit lain tidak berpengaruh signifikan terhadap keterjadian <i>earning restatement</i>
7.	Nina Pertiwi (2012)	Hubungan antara performa komite audit dengan <i>earning quality</i>	-Independensi komite audit -Ukuran -keahlian di bidang finansial -frekuensi pertemuan rapat -kepemilikan saham komite audit	<i>Earning restatement</i>	-Independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian <i>earning restatement</i> - 4 karakteristik komite audit lain tidak berpengaruh signifikan terhadap keterjadian <i>restatement</i>

2.3 Kerangka Penelitian

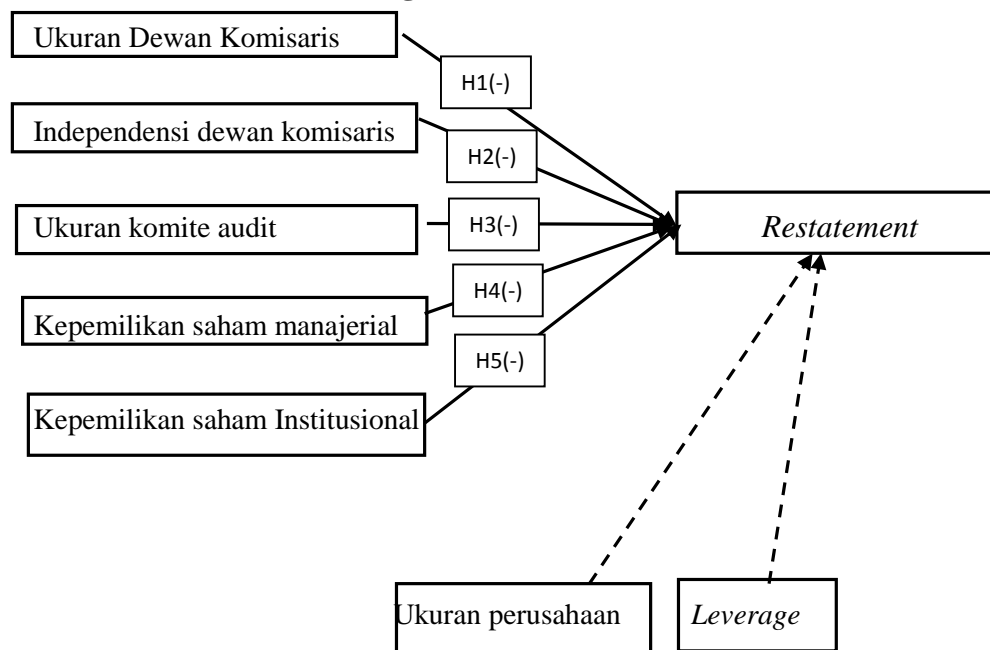
Isu penyimpangan dalam pembuatan laporan keuangan telah dilakukan oleh berbagai perusahaan, baik di Indonesia, maupun di mancanegara. Hal tersebut dapat menjadi tanda lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance*. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efektifitas karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan karakteristik *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit,

kepemilikan saham manajeria, dan kepemilikan saham blockholder sebagai variabel independen (variabel bebas). Sedangkan *restatement* digunakan sebagai variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, perusahaan yang malakukan *restatement* karena adanya penerapan PSAK baru, adanya proses akusisi dan merger, pemecahan saham atau penggabungan saham, dan perubahan metode akuntansi tidak dimasukkan sebagai sampel. *Restatement* dipilih menjadi variabel dependen karena mudah diobservasi serta merupakan kejadian langka yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris

Menurut KNKG (2006), jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan tersebut. Berdasarkan teori agensi, konflik agensi disebabkan karena kurangnya pengawasan yang mengakibatkan tidak seimbangnya informasi yang dimiliki pihak prinsipal dengan pihak agen. Untuk menekan konflik, diperlukan wakil dari pihak prinsipal yang bertugas mengawasi kinerja manajemen. Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang dipilih dan diberi wewenang oleh pemegang saham untuk memonitor kinerja manajemen. Ukuran dewan komisaris adalah unsur penting dalam pembentukan dewan komisaris. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka CEO akan semakin mudah dikendalikan dan pengawasan dapat menjadi semakin efektif.

Penelitian terhadap hubungan ukuran dewan komisaris telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Yuristia dan Niki Lukviarman (2008). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan dewan komisaris yang lebih besar memiliki lebih banyak hubungan eksternal, kemampuan sumber-sumber daya penting seperti pendanaan, dan berkemampuan atau berpengalaman dalam menjalankan bisnis dan atribut ini menunjukkan kinerja yang lebih baik (Dalton et al. 1999).

Bedasarkan uraian di atas, untuk melihat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *earning restatement*, dibuatlah hipotesis sebagai berikut

H1 : Terdapat pengaruh negatif antara jumlah ukuran dewan komisaris terhadap keterjadian restatement

2.4.2 Independensi Dewan Komisaris

KNKG (2006) menyatakan bahwa Dewan komisaris terdiri dari 2 jenis, yaitu komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Perusahaan harus memiliki komisaris independen yang bersifat netral dalam menjalankan tugas pengawasannya. Bapepam dalam peraturan no. IX.I.5 telah menetapkan kriteria kriteria yang harus dimiliki oleh dewan komisaris independen. Independensi menjadi hal karakteristik yang penting agar komisaris dapat mengerjakan tugasnya dengan profesional dan tanpa pengaruh dari pihak manapun. Berdasarkan peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2001, diatur proporsi komisaris independen dalam sebuah perusahaan, yaitu minimal 30% dari jumlah total dewan komisaris.

Teori agensi menyatakan bahwa untuk mengurangi tingkat asimetri informasi, diperlukan pengawasan langsung oleh pihak yang berasal dari wakil prinsipal. Dengan adanya komisaris independen dalam dewan komisaris, pengawasan terhadap manajemen pun akan semakin meningkat dan konflik agensi pun dapat ditekan sehingga kualitas laporan keuangan pun dapat ditingkatkan. Penelitian mengenai pengaruh independensi dewan komisaris terhadap *restatement* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Veronica dan Yanivi S. Bachtiar (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh proporsi komisaris independen dan komite audit terhadap keterjadian *restatement* dan hasilnya proporsi dewan

komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap keterjadian *restatement*.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan, dengan adanya komisaris independen di dalam jajaran dewan komisaris, fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin bagus karena komisaris independen dapat bekerja secara netral dan tanpa ada intervensi dari pihak manajemen. Dengan begitu, pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat.

Bedasarkan uraian diatas, untuk melihat pengaruh antara independensi dewan komisaris terhadap keterjadian *earning restatement*, maka dibuatlah hipotesis:

H2 : Terdapat pengaruh negatif antara independensi dewan komisaris terhadap keterjadian restatement

2.4.3 Ukuran Komite Audit

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris terutama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2008). Peraturan Ketua Bapepam no. IX.I.5 tahun 2004 telah mengatur tentang kriteria independensi bagi komite audit.. Komite audit terdiri sekurang kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara agen dan prinsipal disebabkan karena prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kegiatan agen, yang dapat mendorong agen menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal. Dengan adanya komite audit, maka

aktivitas manajemen dapat dipantau tanpa adanya intervensi dari pihak manapun karena komite audit bersifat independen.

Lin, Jun F. Li, dan Joon S. Yang (2006) meneliti tentang hubungan antara karakteristik komite audit dengan keterjadian restatement dan menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara ukuran komite audit dengan keterjadian *restatement*. Hasil ini mengimplikasikan adanya hubungan jumlah komite audit dengan kualitas laporan keuangan. Menurut KNKG, jumlah efektif dari komite audit adaah 3-5 orang, dimana apabila komite audit terlalu kecil maka fungsi pengawasan akan menjadi tidak maksimal karena kekurangan sumberdaya untuk pendistribusian tugas tugas komite audit. Selain itu, dengan semakin banyaknya komite audit yang ada di dalam perusahaan, Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H3: Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ukuran komite audit dengan tingkat keterjadian restatement

2.4.4 Kepemilikan Saham Manajerial

Menurut Boediono (2005) kepemilikan saham manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen yang dimaksud adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan. Teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Ross et al (1999) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan

cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan sendiri.

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Ujiantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya. Hal ini mengindikasikan pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan (Suprayuga, 2006).

Bedasarkan uraian di atas, untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan manajerial dengan keterjadian *restatement* disusunlah hipotesis sebagai berikut

H4 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kepemilikan saham manajerial dengan tingkat keterjadian restatement

2.4.5 Kepemilikan saham Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, isntitisi berbadan hokum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. al 2006) dalam Winanda (2009). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena setiap keputusan yang diambil oleh manajemen akan berdampak langsung pada kekayaan pemegang saham. Investor institusi sering disebut investor yang canggih. Rajgopal dan Venkatachalam (1998) dalam Komsiah (2005) menyatakan

bahwa investor institusi merupakan investor yang aktif melakukan monitoring terhadap manajemen karena investor institusi pada umumnya memiliki saham untuk jangka panjang. Selain itu, investor institusional dianggap lebih profesional dalam mengelola portofolio nya dibanding investor individual, sehingga investor institusional memiliki kemungkinan yang lebih kecil dalam mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena memiliki tingkat pengawasan yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Yanivi S. Bachtiar (2005) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*, yang artinya semakin besar tingkat kepemilikan institusional, tingkat *restatement* akan semakin rendah.

Teori agensi menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menekan timbulnya konflik agensi yang disebabkan adanya asimetri informasi karena para investor institusi akan melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan sumber daya yang mereka miliki. Hal tersebut timbul karena kekayaan mereka terikat langsung ke perusahaan, dengan kata lain kinerja manajemen akan sangat berdampak bagi mereka. Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap keterjadian *restatement*, maka dibuatlah hipotesis :

H5 : Terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap keterjadian restatement

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Terdapat beberapa jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen variabel dependent, dan variabel control. Variabel dependen yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah penyajian kembali (*restatement*). Sedangkan Variabel Independen yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan tingkat hutang perusahaan.

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini, variabel dependennya menggunakan *restatement*, yaitu penyajian kembali yang disebabkan oleh adanya kesalahan yang dibuat pada laporan keuangan periode lalu. *Restatement* tersebut dibuat untuk mengoreksi kesalahan dalam pembuatan pelaporan keuangan.

Sampel *restatement* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada faktor *restatement* sesuai dengan *GAO's definition of restatement* (2006). *Restatement* terdiri dari beberapa kriteria, diantaranya *restatement* yang disebabkan oleh: 1) Akuisisi dan merger yang tidak sesuai peraturan. 2) Kesalahan dalam mencatat biaya dan perlakuan pajak. 3) *Fraud* 4) klasifikasi item

yang tidak tepat. 5) Kesalahan akuntansi pada akun akun investasi, *goodwill*, aktivitas restrukturisasi, dan penilaian persediaan. 6) *Error* pada pencatatan pengakuan pendapatan. 7) Kesalahan akuntansi dalam perlakuan saham, *derivative*, dan hal-hal yang menyangkut surat berharga (Lampiran Tabel GAO). Sedangkan, *restatement* karena adanya akuisisi, penerapan PSAK baru, stocksplits, dan perubahan metode akuntansi yang dilakukan perusahaan adalah contoh *restatement* yang tidak dimasukkan dalam sampel penelitian karena *restatement* tersebut tidak mengindikasikan adanya kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Variabel dependen diukur menggunakan variabel dummy, angka 1 apabila perusahaan melakukan *restatement*, 0 apabila perusahaan tidak melakukan *restatement*.

3.1.2 Variabel Bebas (*independent variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi Variabel Terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham institusional.

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perusahaan. Semakin banyak ukuran dewan komisaris diharapkan akan mampu membuat pengawasan menjadi lebih efektif. Variabel ukuran dewan komisaris dinyatakan dengan *DKSIZE* dan diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan

3.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris

Bapepam dalam peraturan nomor IX.I.5 tahun 2004 tentang kriteria kriteria menjadi dewan komisaris independen menyatakan dewan komisaris independen harus memenuhi syarat syarat seperti ; (a) tidak memiliki hubungan keluarga maupun bisnis dengan stakeholder perusahaan (b) tidak memiliki saham perusahaan emiten (c) berasal dari luar emiten. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya pihak pihak yang mencoba mempengaruhi de.wan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan dengan proporsi dewan komisaris independen yang semakin besar, maka fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan juga akan meningkat dan praktek manajemen laba dapat ditekan.

Variabel Independensi dewan komisaris dinyatakan dengan DKIND dan diukur dengan menghitung persentase dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan.

3.1.2.3 Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen.

Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini dinyatakan dengan KASIZE dan diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit.

3.1.2.4 Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan saham manajerial dianggap dapat menjadi sarana untuk mengurangi praktek manajemen laba dalam perusahaan . Manajemen yang memiliki saham di perusahaan akan cenderung termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat, karena manajemen akan merasakan dampak langsung dari keputusan yang dibuatnya di dalam perusahaan.

Variabel ini dinyatakan dengan STOCKM. Mengacu pada penelitian Abdullah (2010), pengukuran saham manajerial dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajerial terhadap total saham perusahaan.

3.1.2.5 Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hokum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et al. 2006) dalam Winanda (2009). Semakin besar kepemilikan institusi, maka kekuatan suara dan dorongan terhadap pengawasan kinerja manajemen akan semakin meningkat sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat dan tingkat keterjadian restatement akan semakin rendah..

Veronica (2005) mengukur variabel kepemilikan institusional dengan menghitung proporsi saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hokum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya terhadap total saham pada perusahaan. Pada penelitian ini, saham institusional diberi kode STOCKINS

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang membatasi penelitian. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan menjumlahkan nilai total aset, Variabel kontrol lainnya adalah tingkat leverage perusahaan yang diukur dengan menghitung total hutang perusahaan terhadap total aset perusahaan

3.1.3.1 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan.

3.1.3.2 Tingkat hutang perusahaan (*Financial Leverage*)

Tingkat hutang perusahaan menunjukkan risiko dan sejauh mana perjanjian hutang yang dikenakan pada perusahaan. Dengan demikian, ada kemungkinan keterjadian *misstating* rekening yang lebih tinggi di hadapan level hutang yang tinggi. Tingkat hutang dihitung dengan membagi total kewajiban dengan total aset.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-2012. Pada penelitian ini, pengambilan sam/pel menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang akan dipakai agar sesuai kriteria tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut adalah :

1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012.
2. Sampel merupakan perusahaan yang melakukan penyajian kembali (*restatement*) sesuai kriteria dari *GAO's definition of restatement* (2006) pada laporan keuangannya selama periode 2008-2012.
3. Memiliki ketersediaan data tentang karakteristik *corporate governance* yang diperlukan dalam penelitian. Data tersebut diambil dari laporan tahunan perusahaan pada tahun sebelumnya (t-1)
4. Selanjutnya, sampel perusahaan yang melakukan *restatement* akan dipasangkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *restatement* berdasarkan klasifikasi industri dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang dipakai adalah total aset. Klasifikasi dan ukuran perusahaan dapat diperoleh dari *IDX statistic* dengan mengakses situs idx.co.id atau tersedia di pojok BEI Universitas Diponegoro Semarang

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2008-2012. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs web www.idx.co.id dan situs perusahaan yang bersangkutan. Pencarian penyajian kembali dicari dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan mencari dengan kata kunci seperti;

penyajian kembali, disajikan kembali, penerbitan kembali, *restate*, dan *restatement*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengolah literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan artikel ini. Sedangkan metode studi dokumentasi adalah pengumpulan data dari sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

3.5 Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini, yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel independent terhadap keterjadian *restatement pada* perusahaan yang melakukan *restatement* dengan perusahaan yang tidak melakukan *restatement*. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi logistik. Statistik Deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel variabel dalam penelitian ini. Selain itu, dilakukan pengujian kelayakan model regresi untuk menilai model regresi dalam penelitian ini. Berikut penjelasan terperinci mengenai metode analisis dalam penelitian ini.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif yang digunakan adalah rata rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk menggambarkan

variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran data, dimana data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan bahwa data tersebut semakin menyebar

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menguji hipotesis karena variabel terikatnya merupakan satu non metric dua kategori (Ghozali, 2006). Dalam regresi logistik, tidak diperlukan uji normalitas, heterosekedstas, dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya (Ghozali, 2009).

Model logistik digunakan untuk melihat kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan *restatement* pada periode yang sama. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang mengalami *restatement* dan pasangannya perusahaan yang tidak melakukan *restatement*.

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham institusional. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis akan menggunakan program SPSS.

Persamaan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{RESTATEMENT} = \alpha + \beta_1 \text{DKSIZE}_{(t-1)} + \beta_2 \text{DKIND}_{(t-1)} + \beta_3 \text{KASIZE}_{(t-1)} + \beta_4 \text{STOCKM}_{(t-1)} + \beta_5 \text{STOCKINS}_{(t-1)} + \beta_6 \text{LnCOSIZE}_{(t-1)} + \beta_7 \text{LEVE}_{(t-1)} + e \dots \dots \dots$$

Dimana :

RESTATEMENT	: Merupakan variabel dummy , angka 1 apabila terjadi <i>restatement</i> , angka 0 apabila tidak terjadi <i>restatement</i> .
DKSIZE	: Jumlah anggota dewan komisaris
DKIND	: Persentase dewan komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris
KASIZE	: Jumlah anggota komite audit
STOCKM	: Persentase jumlah saham yang dimiliki manajer terhadap total jumlah saham perusahaan
STOCKINS	:Persentase jumlah saham yang dimiliki oleh para investor institusi terhadap total saham perusahaan.
LnCOSIZE	: Logaritma natural total aset perusahaan
LEVE	: Total hutang dibagi dengan total aset.
(t-1)	: Tahun sebelumnya

Sebelum melakukan pengujian menggunakan regresi logistik, perlu adanya pengujian terhadap data . Analisis ini menggunakan:

3.5.2.1 Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit

Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model atau tidak ada perbedaan antara model dengan data, sehingga dapat dikatakan fit.

Dalam Ghazali (2009) hipotesis yang digunakan dalam model fit adalah :

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H₁ : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* lebih dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu untuk

memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2009)

3.5.5.2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara $-2 \text{ Log Likelihood}$ (-2LL) pada saat model hanya memasukkan konstanta dengan $-2 \text{ Log Likelihood}$ (*Block Number* = 0), dengan saat model memasukkan konstanta dan variabel bebas (*block number* 1). Apabila $-2 \text{ Log Likelihood}$ (*Block Number*=0) > daripada $-2 \text{ Log Likelihood}$ (*Block Number*=1), maka keseluruhan model menunjukkan regresi yang baik. Semakin mengalami penurunan, maka model regresi semakin baik.

3.5.2.3 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke's R square*)

Hasil perhitungan dari *Nagelkerke's R Square* digunakan untuk menunjukkan seberapa besar model yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen dengan menggunakan variabel independen pada penelitian ini. *Nagelkerke R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R square* dengan nilai maksimumnya. Nilai *nagelkerke's R2* dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression (Ghozali, 2005). Nilai *Nagelkerke R square* bervariasi antara satu (1) dan nol (0), dimana apabila model semakin mendekati nilai 1, maka model dianggap semakin *goodness of fit* sementara semakin mendekati nilai 0 maka model semakin tidak *goodness of fit* (Ghozali, 2009)

3.5.2.4. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *restatement*. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan p-value (probability value).

- a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05)
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi p-value. Jika p-value (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika p-value $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.